

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL

Risma Dwi Anggraeni
rismadwiananggraeninur@gmail.com
Sapari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the effect of Local-owned Source Revenue, General Allocation Funds, and Revenue Sharing Funds on capital expenditure in cities/districts of East Java province. The research was quantitative. Moreover, the data were secondary in the form of a realization report of the Local Budget which was taken from BPKAD of East Java province. The population was in the cities/districts of East Java province. Moreover, the data collection technique used purposive sampling. In line with that, there were 38 samples consisting of 9 cities and 29 districts of East Java province. Furthermore, the data were taken during 4 years of the budget year (2018-2021). In total, there were 152 data samples. The data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 26. The result concluded that Local-owned Source Revenue had a positive effect on capital expenditure. Likewise, the General Allocation Fund had a positive effect on capital expenditure. Similarly, the Revenue Sharing Fund had a positive effect on capital expenditure.

Keywords: local-owned source revenue, general allocation fund, revenuesharing fund, capital expenditure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. Populasi penelitian adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Proses pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode penentuan sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan metode *purposive sampling* didapatkan sampel penelitian yaitu 38 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur. Data penelitian diambil selama 4 tahun yaitu tahun anggaran 2018-2021 sehingga diperoleh 152 data yang diolah. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, dan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, belanja modal

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam bidang perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka Panjang (Untoro, 2010:39). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menentukan kesejahteraan masyarakat dalam suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi dapat ditandai dengan adanya peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Pertumbuhan ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh adanya otonomi daerah. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memberikan kebebasan suatu kabupaten dan kota dengan diberikan hak otonom untuk membuat dan mengatur rencana anggaran keuangannya sendiri demi kemajuan daerahnya.

Otonomi daerah mampu meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan untuk masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah (Jaya dan Dwirandra, 2004:80). Otonomi daerah menjadikan kabupaten dan kota dapat melaksanakan kebijakan dan program sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan dan sesuai dengan kebutuhan. Terdapat beberapa faktor yang dapat menunjang keberhasilan otonomi daerah yaitu berkualitasnya sumber daya manusia yang merupakan pelaksana kebijakan, pengelolaan keuangan yang baik yaitu dengan menggali sumber pendapatan daerah, pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penggunaan teknologi yang memadai guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah dan tata kelola manajemen daerah yang berjalan baik sesuai dengan peraturan dan kebijakan. Otonomi daerah dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan strategis yang dapat mempengaruhi kemajuan daerahnya.

Otonomi daerah menjadikan suatu daerah memiliki kemandirian dalam segala bidang termasuk pendanaan pembangunan daerahnya oleh karena itu harus diimbangi dengan adanya pembagian sumber pendapatan yang memadai. Salah satunya yaitu Pendapatan Asli daerah (PAD) yang harus ditingkatkan untuk dapat melaksanakan pembangunan daerah dan mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka akan semakin besar peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat (Mamuka *et al.*, 2019). Selain Pendapatan Asli Daerah sumber penerimaan daerah dapat berasal dari dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Pinjaman Pemerintah Daerah, dan Lain-Lain. Pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan daerah. Alokasi sumber daya ke anggaran didasarkan kepada asas kepatuhan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Kewenangan inilah yang merupakan bagian dari kebijakan otonomi daerah.

Menurut Bastian (2006:354) suatu daerah masih terdapat kesenjangan dalam hal pembangunan hal ini ditinjau dari pendapatan per kapita antar daerah serta masih banyaknya masyarakat yang dibawah garis kemiskinan. Daerah dapat menggali potensi dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk dapat menunjang perekonomian masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih kurangnya infrastruktur penunjang perekonomian dan pemanfaatan sumber daya tidak berjalan dengan baik. Pengalokasian dana dari pemerintah pusat dinyatakan masih belum akurat atau tersalurkan dengan baik. Pemerintah harus mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Pemerintah daerah harus mampu melakukan alokasi anggaran belanja modal dengan baik karena salah satu cara pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yaitu dengan pengalokasian belanja modal yang baik dan efisien sehingga dapat terwujudnya pembangunan daerah. Pembangunan daerah membutuhkan alokasi dana cukup besar hal ini dapat tercermin dari pos belanja yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah maka akan semakin besar dana belanja yang akan dikeluarkan. Belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah.

Pada umumnya belanja daerah yaitu belanja modal setiap daerah seringkali mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan kurs rupiah, inflasi, penyesuaian makro ekonomi dan perubahan cakupan layanan. Oleh karena itu, dalam menjalankan otonomi daerah pemerintah sering kali mengalami kekurangan APBD hal ini

dikarenakan tidak seimbangnya penerimaan dan belanja daerah yang dikeluarkan. Pemerintah mengeluarkan dana perimbangan guna mengatasi permasalahan tersebut. Pemberian dana perimbangan telah diatur dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan pemerintah Pusat dan Daerah. Tujuan diberikannya dana perimbangan ini adalah untuk menambah APBD dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Kebijakan penggunaan anggaran yang diberikan pemerintah pusat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dengan tujuan agar dapat dikelola dan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah.

TINJAUAN TEORITIS

Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*)

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan keadaan dimana manajer tidak termotivasi untuk tujuan individu tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan organisasi. Anton (2010) menyatakan bahwa Meskipun kepentingan manajer (*steward*) dan *principal* tidak sama, *steward* akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan antara dua hal yaitu kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. *Stewardship Theory* menjelaskan sebuah pola kepemimpinan dan hubungan komunikasi antara manajemen dan *principal* dengan mekanisme situasional yang mencakup filosofis manajemen dan perbedaan budaya organisasi, kepemimpinan dalam pencapaian tujuan bersama tanpa menghalangi kepentingan masing-masing (Anton: 2010).

Otonomi Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menjadikan sistem tidak lagi terkonsentrasi di pusat. Pelaksanaan otonomi daerah menerapkan asas desentralisasi artinya pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam mengelola urusan pemerintah dan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Adanya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan pembangunan daerah dengan bertopang pada pendapatan asli daerahnya. Dengan mampu melakukan pemanfaatan hasil daerah maka daerah tersebut dapat dikatakan mandiri untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif. Partisipasi masyarakat akan mengalami kenaikan untuk turut serta melakukan pembangunan dan kemajuan daerahnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari 3 komponen yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi dasar dan pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan dalam waktu satu tahun. Tanpa adanya APBD maka suatu daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan pemerintah. Karena anggaran dalam kegiatan pemerintah daerah harus tercantum dalam APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah digunakan sebagai pendorong dan penentu tercapainya target suatu daerah. APBD hakikatnya merupakan instrumen kebijakan publik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. APBD dapat digunakan sebagai tolak ukur

menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam hal meningkatkan potensi perekonomian daerah.

Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 belanja modal adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi masa manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal digunakan untuk perolehan aset tetap seperti peralatan, belanja tanah, gedung, mesin dan belanja aset tetap lainnya. Selain itu belanja modal dapat digunakan untuk pengeluaran yang digunakan dalam biaya pemeliharaan guna mempertahankan atau menambah nilai aset. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik (Yovita, 2011:28). Dengan semakin meningkatnya efisien dan efektivitas berbagai sektor di daerah maka akan semakin meningkatkan produktivitas masyarakat dan akan meningkatkan pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut undang-undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan dana penerimaan yang berasal dari daerah asli yang digali di daerah tersebut sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha usaha daerah agar dapat memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah merupakan wujud pelaksanaan otonomi daerah dimana pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan kebutuhan daerah. Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan dalam periode yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh pemerintah dalam melakukan pengalokasian anggaran belanja modal. Sumber keuangan dari pendapatan asli daerah dinilai lebih penting daripada dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan daerah sedangkan dana transfer dari pemerintah sifatnya jauh lebih terikat.

Dana Alokasi Umum (DAU)

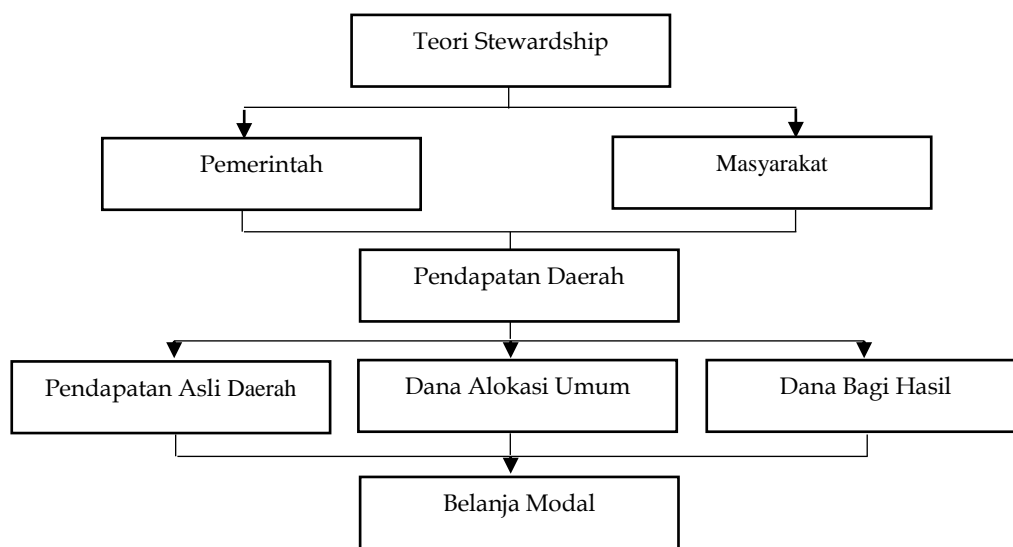
Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum digunakan untuk pembiayaan khusus kegiatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana di daerah yang dinilai masih belum mencapai standar. Dengan adanya dana alokasi umum maka dapat mengurangi ketimpangan fiskal antara daerah satu dengan daerah lainnya. Adanya otonomi daerah mengakibatkan ketimpangan fiskal yang tidak bisa dihindari. Daerah yang tingkat kemiskinan tinggi dan pendapatan asli daerah rendah akan mendapatkan dana alokasi umum lebih besar dari daerah yang kaya dan pendapatan asli daerahnya lebih tinggi begitupun sebaliknya.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan potensi daerah dan melihat angkat persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi

daerah (Listiorini, 2012). Dana bagi hasil terdiri dari dua jenis yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. Dana bagi hasil pajak berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH). Dana bagi hasil bukan pajak berasal dari sumber daya alam seperti kehutanan, pertambangan umum, perikanan, minyak bumi, gas bumi dan pertambangan panas bumi. Prinsip yang digunakan dalam melakukan alokasi dana bagi hasil yaitu berdasarkan sumbernya, dalam artian dana bagi hasil yang diberikan berdasarkan atas daerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen dana bagi hasil kecuali perikanan.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Pemikiran
 Sumber : Hasil Olah Data Peneliti, 2023

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut dan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Pendapatan asli setiap daerah berbeda beda hal ini dikarenakan terdapat perbedaan dalam segi kondisi ekonomi, sumber daya alam dan jumlah penduduk. Penelitian yang dilakukan oleh Juniawan dan Suryantini (2018) yang berjudul Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja Modal. Dengan pendapatan asli daerah yang semakin tinggi maka belanja modal akan semakin tinggi. Masyarakat akan mendapatkan fasilitas dan pelayanan publik yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang didistribusikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah dan membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pengalokasian dana alokasi umum berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Halim dan Abdullah (2004) dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum

dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang peningkatan DAU suatu daerah akan meningkatkan potensi daerah tersebut dan penurunan transfer DAU akan menyebabkan penurunan belanja modal. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas berpindahnya hak pemungutan sumber pendapatan daerah kepada pemerintah pusat. Pemberian dana bagi hasil bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian yang dilakukan Waskito *et al.* (2019) berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Aceh) menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek Penelitian)

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menganalisis data dengan bentuk angka baik secara langsung dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan kualitatif (Wiyono, 2011:129). Populasi dalam penelitian ini adalah 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 9 Kota dan 29 Kabupaten dimulai pada tahun 2018-2021.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini kriteria sampel yang akan digunakan adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur meliputi 29 Kabupaten dan 9 Kota yang telah mempublikasikan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah secara lengkap selama 4 tahun dimulai pada tahun 2018 - 2021 dan bisa diakses serta memiliki informasi yang lengkap, jelas dan dapat diolah.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung tetapi melalui media perantara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Laporan Realisasi APBD periode tahun 2018-2021 yang diperoleh dari instansi Pemerintahan yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat disebabkan variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Belanja modal adalah belanja daerah yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan

daerah. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Belanja modal dapat diukur dengan menggunakan rumus :

Belanja Modal = belanja modal tanah + belanja modal peralatan dan mesin + belanja modal Gedung dan bangunan + belanja modal jalan + irigasi dan jaringan + belanja aset tetap + belanja aset lainnya.

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah bertujuan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 perhitungan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan + PAD Lainnya yang Sah.

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) kemudian dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan keuangan dan mendanai kebutuhan daerah untuk mengurangi ketimpangan fiskal dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016) untuk menghitung dana alokasi umum dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Dana Alokasi Umum = Celah Fiskal + Alokasi Dasar

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal

Alokasi Dasar = $90\% \times 25\% \times \text{PDN} \times \text{Bobot Kabupaten/Kota}$

Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan persentase tertentu untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana bagi hasil terdiri dari dua jenis yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam). Menurut UU No. 33 Tahun 2004 perhitungan dana bagi hasil adalah sebagai berikut :

Dana Bagi Hasil = Dana Bagi Hasil Pajak + Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah teknik analisis pengumpulan dan mendeskripsikan suatu data yang diteliti untuk memberikan sebuah informasi yang bermanfaat atau gambaran sehingga dapat memudahkan pembaca melalui kesimpulan yang berlaku umum. Dengan menggunakan analisis statistik deskriptif peneliti dapat menyederhanakan suatu data. Analisis statistik deskriptif yang digunakan yaitu rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, dan standar deviasi. Hasil dari teknik analisis statistik deskriptif dapat berupa diagram, gambar dan tabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas mempunyai tujuan untuk mengetahui distribusi dari residual atau variabel pengganggu apakah berdistribusi normal atau tidak. Jika residual tidak berdistribusi normal maka dapat mengakibatkan ketidakvalidan data atau data mengalami degradasi. Metode *normal probability plot* yaitu suatu model regresi dikatakan memiliki

distribusi normal apabila titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Jika titik menjauh dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi uji normalitas atau bisa dikatakan tidak berdistribusi normal. Dalam bentuk kurva model regresi berdistribusi normal akan membentuk gambar lonceng (*bell-shaped curve*) dengan kedua sisi melebar sampai titik tak terhingga. Metode uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* apabila nilai berada di bawah 0,05 maka model regresi dikatakan tidak normal, jika nilai di atas 0,05 maka model regresi tersebut normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji ada atau tidak adanya model regresi berbentuk korelasi di antara variabel bebas (*independent*) atau tidak (Suliyanto, 2011:81). Untuk mengetahui apakah terjadi Multikolinearitas atau setidaknya yaitu dengan melihat *Tolerance (TOL) Variance Factor (VIF)*. Apabila dari hasil pengujian diperoleh nilai TOL lebih besar dari 0,10 dari nilai VIF menunjukkan kurang dari 10, maka dapat dikatakan bahwa model yang dapat dikatakan terbebas dari gejala adanya Multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear berganda terdapat korelasi antara satu periode *t* dengan periode sebelumnya (*t-1*). Autokorelasi dapat terjadi dikarenakan adanya observasi yang terus menerus beruntun dari waktu ke waktu. Menurut Ghazali (2018:112) untuk mengetahui suatu model regresi linear berganda terdapat autokorelasi atau tidak maka dapat menggunakan Uji Durbin-Watson.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menurut Ghazali (2018:137) dijelaskan bahwa jika *variance residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut Homoskedastisitas dan jika *variance residual* berbeda maka disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu Heteroskedastisitas atau tidak terjadinya Homoskedastisitas. Uji Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (terikat) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap belanja modal sebagai variabel dependen pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa timur. Persamaan analisis regresi pada penelitian ini yaitu :

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DBH + e$$

Keterangan :

BM : Belanja Modal
 α : Konstanta
 PAD : Pendapatan Asli Daerah
 DAU : Dana Alokasi Umum
 DBH : Dana Bagi Hasil
 e : Standar eror (*error tern*)

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) mempunyai tujuan untuk mengukur besarnya kemampuan model dalam memberikan keterangan mengenai variabel terikat (Ghozali, 2018:

97). Apabila nilai koefisien semakin tinggi maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin baik. Nilai koefisien (R^2) berada antara nol (0) dan satu (1). Apabila nilai koefisien (R^2) kecil mempunyai arti bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terdapat keterbatasan. Sedangkan, apabila nilai koefisien (R^2) mendekati satu maka variabel independen dapat memberikan informasi terkait variabel dependen.

Uji Kelayakan Model (F)

Uji kelayakan model untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Uji kelayakan model dapat dilakukan dengan dua cara yaitu uji koefisien determinasi (R^2) dan uji F (*Goodness of fit*). Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), Jika nilai signifikan lebih kecil dari α maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan).

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (bebas) secara individual memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (terikat) dengan menganggap variabel bebas lainnya bersifat konstan. Uji ini dilakukan dengan memperbandingkan t hitung dengan t tabel. Dalam menentukan keputusan yang digunakan dalam uji t terdapat kriteria pengujian menurut yaitu sebagai berikut: (a) jika nilai nilai signifikansi $\leq 0,05$, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen ; (b) jika nilai signifikansi $\geq 0,05$, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif digunakan untuk melakukan analisis suatu data dalam penelitian yang telah dikumpulkan agar mendapatkan suatu informasi dan kesimpulan yang berguna. Dengan menggunakan statistik deskriptif data yang didapatkan akan lebih sederhana sehingga dapat mempermudah dalam melakukan pengamatan. Dalam statistik deskriptif terdapat beberapa informasi yang dapat dilihat yaitu standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai rata-rata (mean). Hasil dari analisis deskriptif dengan menggunakan *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) 26 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	152	25.60	29.31	26.6178	.71149
DAU	152	26.63	28.20	27.5041	.36732
DBH	152	24.76	28.74	25.6584	.68237
BM	152	24.96	28.64	26.4816	.63141
Valid N (listwise)	152				

Sumber : Data Sekunder diolah, 2023

Pendapatan asli daerah berdasarkan tabel analisis statistik deskriptif mempunyai nilai minimum sebesar 25.60. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang memiliki Pendapatan asli daerah terendah yaitu Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021. Sedangkan untuk nilai maximum pendapatan asli daerah yaitu sebesar 29.31. Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan nilai pendapatan asli daerah terbesar yaitu

Kota Surabaya pada tahun 2019. Nilai rata-rata (mean) berdasarkan tabel yaitu pendapatan asli daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 26.6178 sedangkan standar deviasi yaitu sebesar 0.71149.

Dana alokasi umum berdasarkan tabel analisis statistik deskriptif mempunyai nilai minimum sebesar 26.63. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang memiliki dana alokasi umum terendah yaitu Kota Mojokerto pada tahun 2021. Sedangkan untuk nilai maximum dana alokasi umum yaitu sebesar 28.20. Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan dana alokasi umum terbesar yaitu Kabupaten Jember pada tahun 2019. Nilai rata-rata (mean) berdasarkan tabel yaitu dana alokasi umum memiliki nilai rata-rata sebesar 27.5041 sedangkan standar deviasi yaitu sebesar 0.36372.

Dana bagi hasil berdasarkan tabel analisis statistik deskriptif mempunyai nilai minimum sebesar 24.76. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang memiliki dana bagi hasil terendah yaitu Kabupaten Pacitan pada tahun 2021. Sedangkan untuk nilai maximum dana bagi hasil yaitu sebesar 28.74. Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan dana bagi hasil terbesar yaitu Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021. Nilai rata-rata (mean) berdasarkan tabel yaitu dana bagi hasil memiliki nilai rata-rata sebesar 25.6584 sedangkan standar deviasi yaitu sebesar 0.68237.

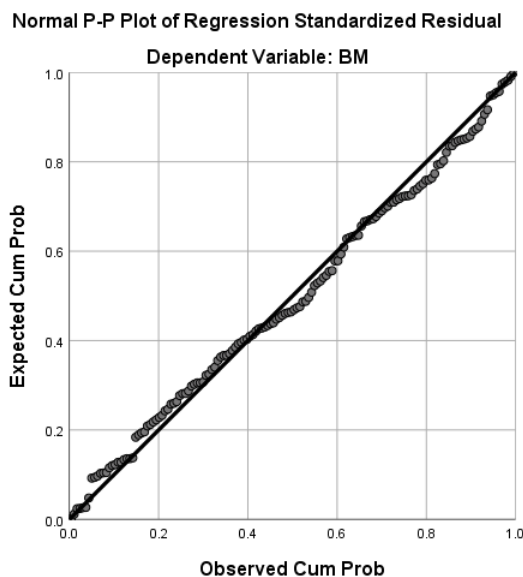
Belanja modal berdasarkan tabel analisis statistik deskriptif mempunyai nilai minimum sebesar 24.96. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang memiliki belanja modal terendah yaitu Kota Probolinggo pada tahun 2021. Sedangkan untuk nilai maximum belanja modal yaitu sebesar 28.64. Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan belanja modal terbesar yaitu Kota Surabaya pada tahun 2019. Nilai rata-rata (mean) berdasarkan tabel yaitu belanja modal memiliki nilai rata-rata sebesar 26.4816 sedangkan standar deviasi yaitu sebesar 0.63141.

Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi linier berganda dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan lolos uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Data yang akan digunakan dilakukan pengujian terlebih dahulu apakah sudah memenuhi persyaratan yaitu harus terdistribusi secara normal dan tidak mengandung multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah nilai residual dalam model regresi dalam hal ini variabel penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Berikut ini hasil uji normalitas dengan grafik normal *probability plot* :



Gambar 2
Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Sumber : Data Sekunder diolah, 2023

Pada gambar 1 Analisis uji normalitas dengan menggunakan grafik normal *probability plot* menunjukkan bahwa titik-titik mengikuti arah garis diagonal dan tidak menyebar menjauhi garis diagonal. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi dengan normal.

Uji normalitas dengan *kolmogorov-smirnov*, apabila nilai signifikansi dibawah 0,05 menunjukkan bahwa data berdistribusi tidak normal sebaliknya apabila nilai signifikansi berada diatas 0,05 mempunyai arti data tersebut berdistribusi normal. Berikut ini tabel Uji normalitas dengan *kolmogorov-smirnov* :

Tabel 2
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		152
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.37514235
Most Extreme Differences	Absolute	.050
	Positive	.050
	Negative	-.044
Test Statistic		.050
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel 2 uji *kolmogorov-smirnov* menunjukkan bahwa Asymp. Sig. (2-tailed) memiliki nilai sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal dikarenakan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 sehingga data penelitian dapat digunakan.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah suatu model regresi memiliki korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dalam suatu variabel penelitian dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* dalam suatu model regresi lebih besar dari 0,10 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) kurang dari 10 maka model regresi tidak terdapat multikolinearitas. Berikut ini tabel hasil uji multikolinearitas :

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	-8.673	2.558			-3.390	.001		
PAD	.294	.060	.331		4.862	.000	.514	1.945
DAU	.806	.103	.469		7.834	.000	.665	1.504
DBH	.201	.053	.217		3.800	.000	.731	1.368

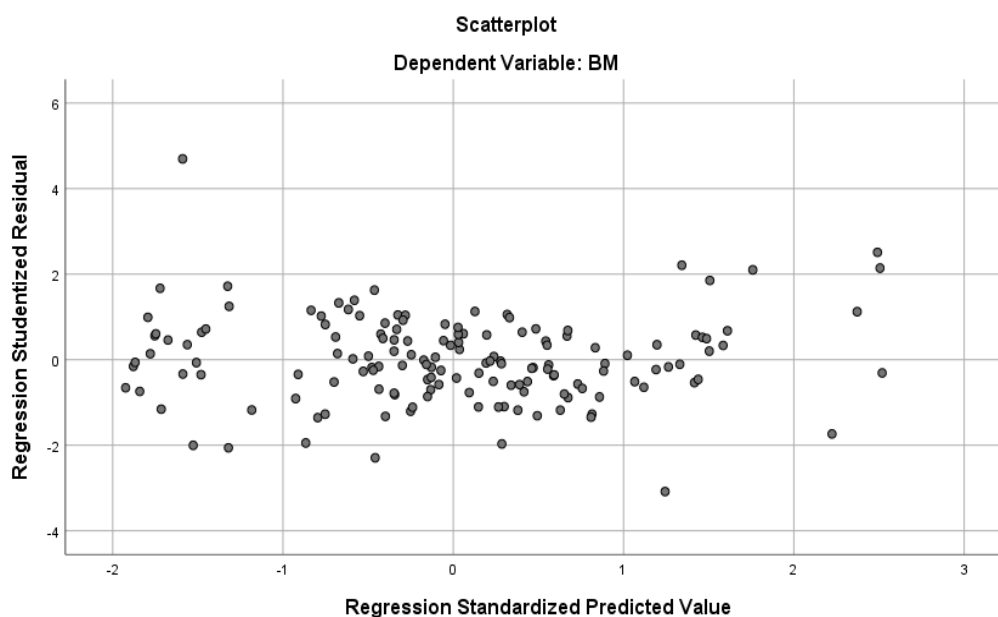
a. Dependen Variable: BM

Sumber : Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel 3 hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* variabel independen meliputi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana dana bagi hasil memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) kurang dari 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual dalam suatu model regresi. Apabila pada grafik scatterplots terlihat pola yang tidak jelas dan titik menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Berikut ini tabel hasil uji heteroskedastisitas :



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
 Sumber : Data Sekunder diolah, 2023

Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear berganda terdapat korelasi antara satu periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson. Dasar pengambilan keputusan pada uji autokorelasi adalah nilai $du < d < 4-du$, apabila dasar pengambilan ini terpenuhi maka data tidak mengandung autokorelasi. Berikut ini tabel hasil uji autokorelasi:

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.804 ^a	.647	.640	.37893	1.887

a. Predictors: (Constant), DBH, DAU, PAD

b. Dependen Variable: BM

Sumber : Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4 hasil uji multikolinearitas didapatkan nilai durbin-watson yaitu 1.887. Nilai durbin watson akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi yaitu 5%, jumlah sampel 152 dan jumlah variabel independen yaitu sebanyak 3 variabel. Maka didapatkan nilai d_l sebesar 1.68948 dan nilai du sebesar 1.7752. Dikarenakan nilai DW lebih besar daripada nilai du dan kurang dari $4-du$ ($4 - 1.7752 = 2.2248$) maka dapat dikatakan bahwa data penelitian tidak terdapat autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda mempunyai tujuan untuk mengukur besarnya hubungan atau pengaruh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil dengan variabel dependen yaitu belanja modal. Hasil analisis dari pengujian analisis regresi linear berganda disajikan sebagai berikut :

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-8.673	2.558		-3.390	.001
	PAD	.294	.060	.331	4.862	.000
	DAU	.806	.103	.469	7.834	.000
	DBH	.201	.053	.217	3.800	.000

a. Dependen Variable: BM

Sumber : Data Sekunder diolah, 2023

Dari tabel 5 hasil uji regresi linear berganda dapat dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$BM = -8.673 + 0,294PAD + 0,806DAU + 0,201DBH + e$$

Apabila nilai suatu variabel independen dalam penelitian sebesar 0 maka nilai variabel dependen yaitu sama dengan nilai konstanta. Nilai konstanta pada persamaan diatas diketahui sebesar -8.673 hal ini berarti apabila nilai variabel independen yang meliputi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil 0 maka nilai belanja modal sebagai variabel dependen yaitu -8.673.

Koefisien pendapatan asli daerah yaitu sebesar 0,294. Nilai koefisien ini bernilai positif sehingga menghasilkan suatu hubungan yang positif antara variabel pendapatan asli daerah dengan belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli suatu daerah maka belanja modal akan semakin meningkat. Sebaliknya, apabila pendapatan asli daerah mengalami penurunan maka akan diikuti oleh penurunan belanja modal.

Koefisien pendapatan asli daerah yaitu sebesar 0,806. Nilai koefisien ini bernilai positif sehingga menghasilkan suatu hubungan yang positif antara variabel dana alokasi umum dengan belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dana alokasi umum maka belanja modal akan semakin meningkat. Sebaliknya, apabila dana alokasi umum mengalami penurunan maka akan diikuti oleh penurunan belanja modal.

Koefisien dana bagi hasil yaitu sebesar 0,201. Nilai koefisien ini bernilai positif sehingga menghasilkan suatu hubungan yang positif antara variabel dana bagi hasil dengan belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dana bagi hasil maka belanja modal akan semakin meningkat. Sebaliknya, apabila dana bagi hasil mengalami penurunan maka akan diikuti oleh penurunan belanja modal.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk melakukan pengukuran kemampuan model dalam menerangkan suatu variabel dependen. Nilai koefisien determinasi mendekati 1 menjelaskan bahwa variabel independen memberikan semua informasi untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018:87). Berikut ini tabel hasil uji koefisien determinasi (R^2) :

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.804 ^a	.647	.640	.37893

a. Predictors: (Constant), DBH, DAU, PAD

b. Dependen Variable: BM

Sumber : Data Sekunder diolah, 2023

Dari hasil pengujian koefisien determinasi didapatkan nilai R^2 yaitu 0.647 atau 64,7%. Hal ini menunjukkan variabel independen penelitian yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 64,7%. Sedangkan 36% ($100\% - 64,7\% = 35,3\%$) dijelaskan dengan variabel diluar penelitian.

Uji Kelayakan Model (F)

Uji kelayakan model atau yang biasa disebut dengan uji (F) memiliki tujuan untuk tingkat keterikatan antara variabel independen dan variabel dependen. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), Jika nilai signifikan lebih kecil dari α maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Berikut ini tabel hasil uji kelayakan model (F):

Tabel 7
Hasil Uji Kelayakan Model (F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	38.950	3	12.983	90.422	.000 ^b
	Residual	21.250	148	.144		
	Total	60.200	151			

a. Dependen Variable: BM

b. Predictors: (Constant), DBH, DAU, PAD

Sumber : Data Sekunder diolah, 2023

Dari hasil uji Anova didapatkan bahwa nilai F hitung sebesar 90.422 dengan Sig 0.000. Dikarenakan nilai Sig lebih rendah dari 0.05 (Sig 0.000 < 0,005) maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi belanja modal atau dapat dikatakan bahwa variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil mempengaruhi belanja modal yang merupakan variabel dependen.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis (t) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh kepada variabel dependen. Apabila nilai signifikansi uji t memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai 0,05 maka hipotesis diterima. Sebaliknya apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Berikut ini tabel hasil uji t :

Tabel 8
Hasil Uji Hipotesis (t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-8.673	2.558		-3.390	.001		
PAD	.294	.060	.331	4.862	.000	.514	1.945
DAU	.806	.103	.469	7.834	.000	.665	1.504
DBH	.201	.053	.217	3.800	.000	.731	1.368

a. Dependen Variable: BM

Sumber : Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel 8 Hasil uji Hipotesis (t) maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

H₁ : Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal

Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan didapatkan nilai signifikansi pendapatan asli daerah yaitu 0,000 nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis dapat diterima. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

H₂: Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal

Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan didapatkan nilai signifikansi dana alokasi umum yaitu 0,000 nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis dapat diterima. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

H₃ : Dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal

Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan didapatkan nilai signifikansi dana bagi hasil yaitu 0,000 nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis dapat diterima. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

H₁ menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa H₁ dapat diterima. Hal ini didasarkan pada nilai koefisien pendapatan asli daerah yaitu sebesar 0,294 dimana nilai koefisien ini bernilai positif. Selain itu, nilai signifikansi pendapatan asli daerah yaitu sebesar 0,000 nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel independen yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu belanja modal. Hal ini berarti semakin tinggi pendapatan asli daerah maka akan semakin meningkatkan belanja modal suatu daerah.

Sumber dari pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh pemerintah dalam melakukan pengalokasian anggaran belanja modal. Pendapatan asli suatu daerah harus terus menerus dilakukan peningkatan agar dapat membiayai beban belanja untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. Sumber keuangan dari pendapatan asli daerah dinilai lebih penting daripada dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah yang tinggi maka dana perimbangan yang diberikan pemerintah akan semakin berkurang hal ini merupakan perkembangan positif. Peningkatan pelayanan publik dan sarana prasarana akan memicu peningkatan pendapatan asli daerah sehingga dapat mengoptimalkan potensi pendanaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan asli daerah menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah harus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan alokasi belanja modal. Dengan peningkatan pendapatan asli daerah maka pembangunan daerah akan lebih cepat. Tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan berkurang hal ini menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang semakin baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juniawan dan Suryantini (2018) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. Pada penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Fahlevi (2016) menunjukkan hasil yang sama yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Syukri dan Hinaya (2019) juga menghasilkan kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

H₂ menyebutkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa H₂ dapat diterima. Hal ini didasarkan pada nilai koefisien dana alokasi umum yaitu sebesar 0,806 dimana nilai koefisien ini bernilai positif. Selain itu, nilai signifikansi dana alokasi umum yaitu sebesar 0,000 nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel independen yaitu dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Semakin tinggi dana alokasi umum maka akan semakin tinggi belanja modal.

Dana Alokasi Umum berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum dikelola secara penuh oleh pemerintah daerah dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan daerah. Daerah dapat menggunakan dana transfer umum untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan terbaik melalui belanja modal. DAU dapat juga digunakan untuk pembiayaan khusus kegiatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, pemerintah daerah mempunyai

wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan undang-undang No. 32 tahun 2004. Dengan adanya DAU maka dapat mengurangi ketimpangan fiskal antara daerah satu dengan daerah lainnya. Daerah yang tingkat kemiskinan tinggi dan pendapatan asli daerah rendah akan mendapatkan DAU lebih besar dari daerah yang kaya dan pendapatan asli daerahnya lebih tinggi begitupun sebaliknya.

Adanya pengaruh positif dana alokasi umum terhadap belanja modal maka pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga dapat meningkatkan kemajuan daerah. Pemerintah dapat memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga daerah yang kekurangan akan semakin terbantu. Semakin banyak dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah daerah maka akan semakin tinggi belanja modal daerah guna terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Waskito *et.al* (2019) yang menjelaskan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Selain itu penelitian dengan hasil yang sama dilakukan oleh Jayanti (2020) menjelaskan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Adiwiyana (2011) juga mendapatkan kesimpulan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

H₃ menyebutkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa H₃ dapat diterima. Hal ini didasarkan pada nilai koefisien dana bagi hasil yaitu sebesar 0,201 dimana nilai koefisien ini bernilai positif. Selain itu, nilai signifikansi dana bagi hasil yaitu sebesar 0,000 nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel independen yaitu dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal. Semakin tinggi dana bagi hasil maka akan semakin tinggi belanja modal.

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan potensi daerah dan melihat angkut persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Listiorini, 2012). Dana bagi hasil terdiri dari dua jenis yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. Dana yang bersumber dari pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPH). Sedangkan, dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam meliputi kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi, gas bumi, dan perikanan. Dana bagi hasil mempunyai peran penting untuk pendanaan dan pembangunan daerah. Dengan adanya dana bagi hasil kepada suatu daerah maka akan menciptakan pemerataan wilayah sehingga akan terciptanya desa yang sejahtera.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Waskito *et al.* (2019) berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Aceh) menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian dengan hasil yang sama yang dilakukan oleh Susanti dan Fahlevi (2016) menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil berpengaruh positif dan bersifat signifikan terhadap pengalokasian belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil maka akan terjadi peningkatan biaya belanja

modal Kabupaten/Kota. Diharapkan hal ini dapat memberikan peningkatan infrastruktur dan memberikan pelayanan publik dan menyeimbangkan keuangan antar masing-masing daerah agar tidak terjadi ketimpangan fiskal.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan pada variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil. Sedangkan sebenarnya terdapat beberapa variabel yang kemungkinan dapat mempengaruhi variabel dependen yang belum termasuk pada penelitian ini. Penelitian ini hanya dilakukan pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan periode yang digunakan hanya empat tahun yaitu 2018-2021.

Saran

Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah atau memperluas variabel independen yang dapat mempengaruhi belanja modal seperti dana alokasi khusus, pertumbuhan ekonomi, sisa lebih pembiayaan anggaran dan lain sebagainya. Bagi Pemerintah, diharapkan pemerintah pusat dapat meningkatkan manajemen pengelolaan keuangan yang dialokasikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat lebih mengoptimalkan alokasi biaya dari pemerintah pusat untuk kemajuan daerahnya dengan meningkatkan sarana, prasarana dan juga fasilitas agar otonomi daerah dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwiyana, P. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Anton, F.X. 2010. Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah Informastika* 1(2) : 61-75.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. <https://djpk.kemenkeu.go.id>. 10 Januari 2023 (11:30).
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. dan S. Abdullah. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI* No.2/Tahun XIII/25.
- Jaya, I.P.N.P.K dan A. A. N. B. Dwirandra, 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi* 7 (1) :79-92.
- Jayanti, F.D. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 8(3) : 335:341.
- Juniawan, M., A dan N. P. Suryantini. 2018. Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud* 7(1) : 1255-1281.
- Listiorini. 2012. Fenomena Flypaper Effect pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli daerah Terhadap Belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal keuangan dan Bisnis* 7(1) : 111-126.
- Mamuka, K.K., I.P.F. Rorong, dan J.I. Sumual. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

- Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19(3) : 119-128.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang *Belanja Modal*.
_____ No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*
- Susanti, S., dan H. Fahlevi, (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 1 (1), 183-191.
- Syukri, M. dan Hinaya 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal OF Economic, Management And Accounting* 2(2) 2615-5850.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*. (revisi dari Undang-Undang No.32 Tahun 2004).
_____ No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Untoro, J. 2010. *Ekonomi Makro*. Kawah Media. Jakarta.
- Waskito, Zuhrotun, dan Rushelisyani. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Journal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* 3(2) : 220-238.
- Wiyono, G. 2011. *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 and Smart PLS 2.0*. STIM YKPN. Yogyakarta.
- Yovita, F. M. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang. Semarang.